



BPK Hasilkan 3.711 Temuan

KEPALA Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio menyatakan, hingga semester I 2015, BPK telah menghasilkan 3.711 temuan atau mengalami penambahan jumlah temuan.

"Dari hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 sebanyak 137 temuan dan 8.163 rekomendasi atau mengalami penambahan jumlah rekomendasi sebanyak 394 rekomendasi," ujar Didi, Selasa (15/8).

Didi menuturkan, penambahan jumlah temuan dan rekomendasi tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014.

"Khusus untuk enam Pemda (Pemprov, Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Ketapang dan Kayong Utara), diserahkan laporan hasil pemantauan TLRHP dan laporan hasil pemantauan kerugian negara atau daerah pada Selasa.

"Terdapat 3.599 rekomendasi atau sebesar 44,09 persen dari total keseluruhan rekomendasi pada pemerintah daerah Kalbar," ucapnya.

Penyelesaian tindak lanjut masing-masing Pemda di Kalbar, jelas Didi, seperti Pemprov Kalbar terdapat 863 rekomendasi atau sebesar 67,79 per-

sen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.

"Sebanyak 381 rekomendasi atau sebesar 29,93 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Empat rekomendasi sebesar 0,31 persen belum ditindaklanjuti. Sedangkan sebanyak 25 rekomendasi atau 1,96 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," tuturnya.

Kota Pontianak terdapat 470 rekomendasi atau sebesar 68,51 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 208 rekomendasi atau sebesar 30,32 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.

"Sebanyak enam rekomendasi atau sebesar 0,87 persen belum ditindaklanjuti. Sedangkan sebanyak dua rekomendasi atau 0,29 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," jelasnya.

Selanjutnya, kata Didi, Kubu Raya terdapat 139 rekomendasi atau sebesar 51,87 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 123 rekomendasi atau sebesar 45,90 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. "Sebanyak enam rekomendasi atau sebesar 2,24 persen belum ditindaklanjuti," ujarnya.

Untuk Mempawah, terdapat 351 re-

komendasi atau sebesar 77,31 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 89 rekomendasi atau sebesar 19,60 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.

"Sembilan rekomendasi atau sebesar 1,98 persen belum ditindaklanjuti. Lima rekomendasi atau 1,10 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," katanya.

Sedangkan Ketapang, terdapat 310 rekomendasi atau sebesar 50,49 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 218 rekomendasi atau sebesar 35,50 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan ada 86 rekomendasi atau sebesar 14,01 persen belum ditindaklanjuti.

Terakhir Kayong Utara, terdapat 192 rekomendasi atau sebesar 63,16 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 107 rekomendasi atau sebesar 35,20 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan sebanyak lima rekomendasi atau sebesar 1,64 persen belum ditindaklanjuti.

"Kita berharap, kepala daerah dapat terus berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan penyelesaian status rekomendasi, hasil pemeriksaan BPK," ungkapnya. (rul)